



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Nusa Tenggara Timur



BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing, dan konvergensi*);
4. Perbaiki kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



Abu SRI MULYANI INDRAWATI *h*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	12
1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	13
2. KAB. ALOR	14
3. KAB. BELU.....	15
4. KAB. ENDE	16
5. KAB. FLORES TIMUR.....	17
6. KAB. KUPANG.....	18
7. KAB. LEMBATA	19
8. KAB. MANGGARAI.....	20
9. KAB. NGADA.....	21
10. KAB. SIKKA.....	22
11. KAB. SUMBA BARAT.....	23
12. KAB. SUMBA TIMUR.....	24
13. KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	25
14. KAB. TIMOR TENGAH UTARA.....	26
15. KOTA KUPANG	27
16. KAB. ROTE NDAO	28
17. KAB. MANGGARAI BARAT	29
18. KAB. NAGEKEO.....	30
19. KAB. SUMBA BARAT DAYA.....	31
20. KAB. SUMBA TENGAH.....	32
21. KAB. MANGGARAI TIMUR.....	33
22. KAB. SABU RAIJUA	34
23. KAB. MALAKA.....	35
TIM PENYUSUN BUKU.....	36

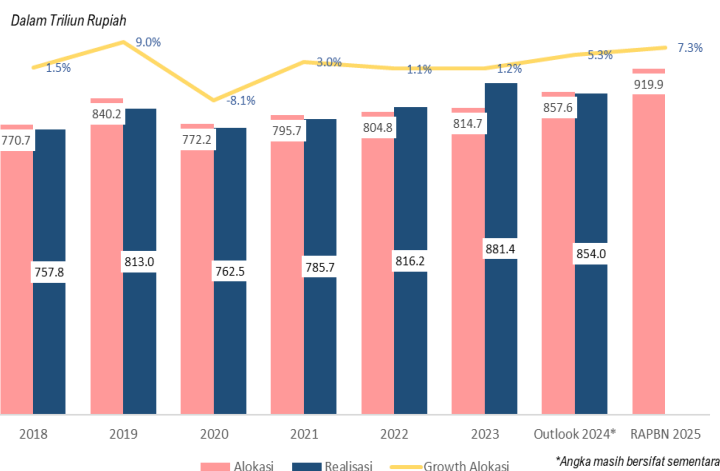


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing, dan konvergensi*).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

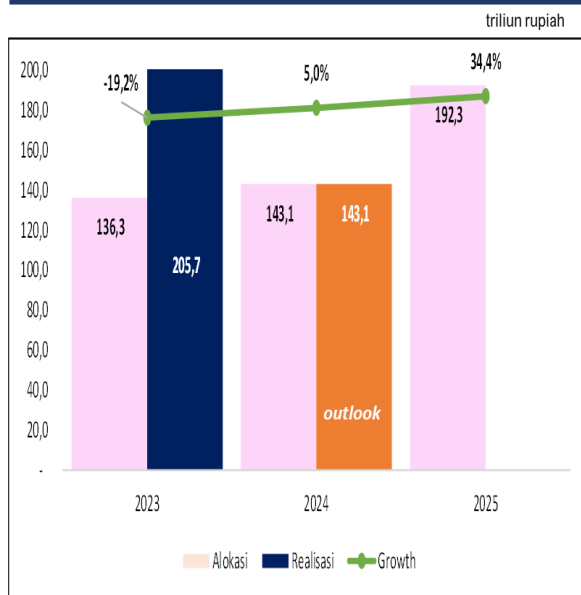
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025



(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

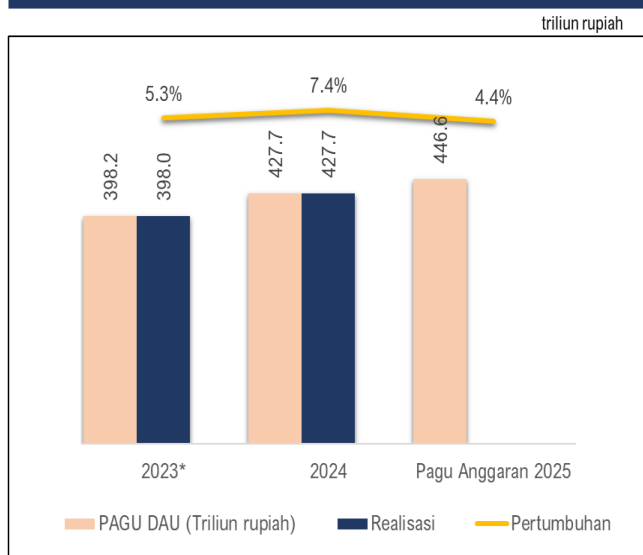
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR	DBH CHT	DBH Sawit
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan • Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD) ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030, ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan, ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. • Penerima manfaat termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ petani tembakau dan buruh tani tembakau. ○ petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. • Fleksibilitas penggunaan <ul style="list-style-type: none"> ○ Opsi pengalihan anggaran. ○ Penambahan menu kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi). • Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. ○ Sertifikasi ISPO pekebun. ○ Rehab hutan dan lahan. • Terdapat nilai alokasi minimum per daerah. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

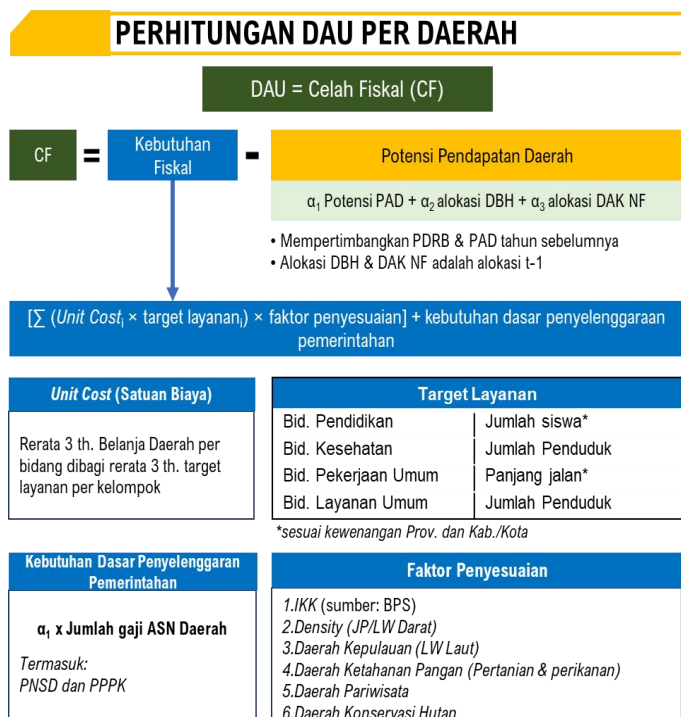
☐ Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

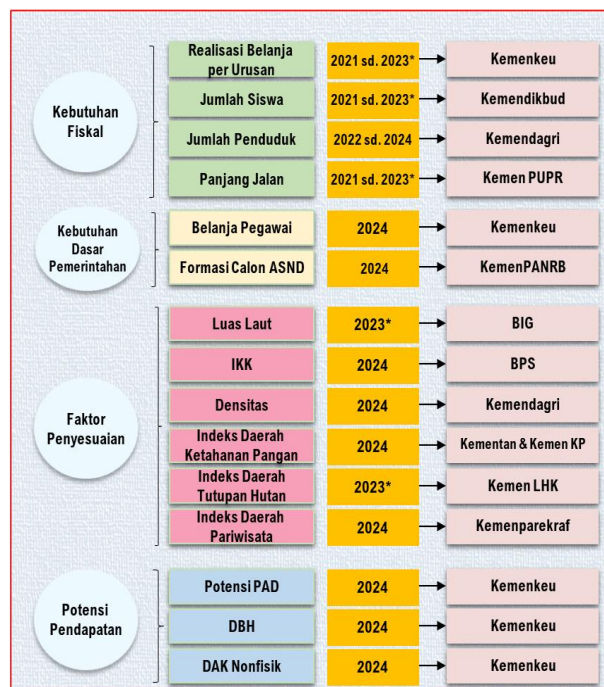
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggajian formasi ASND yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggajian PPPK 2025, dan dukungan penggajian PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

1. Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
2. Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
3. Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar - 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
4. Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

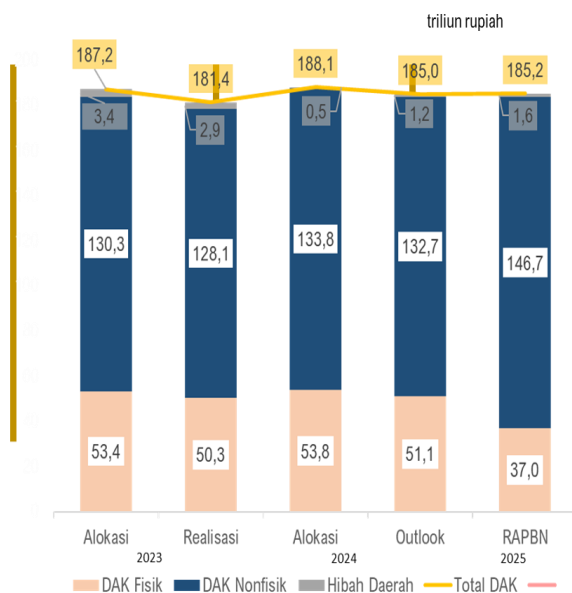
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 1. Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 2. Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

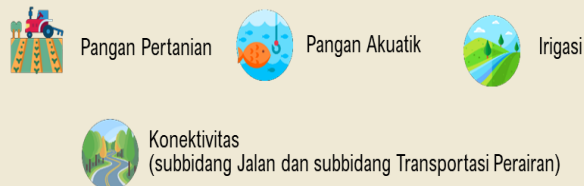
1. **DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
2. **DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
3. **Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
4. **Matching program dan sinergi pendanaan.**
5. **Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

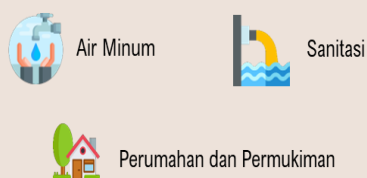
DAK Fisik Layanan Dasar



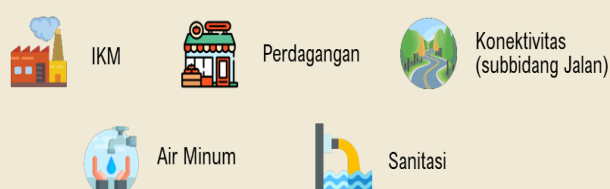
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

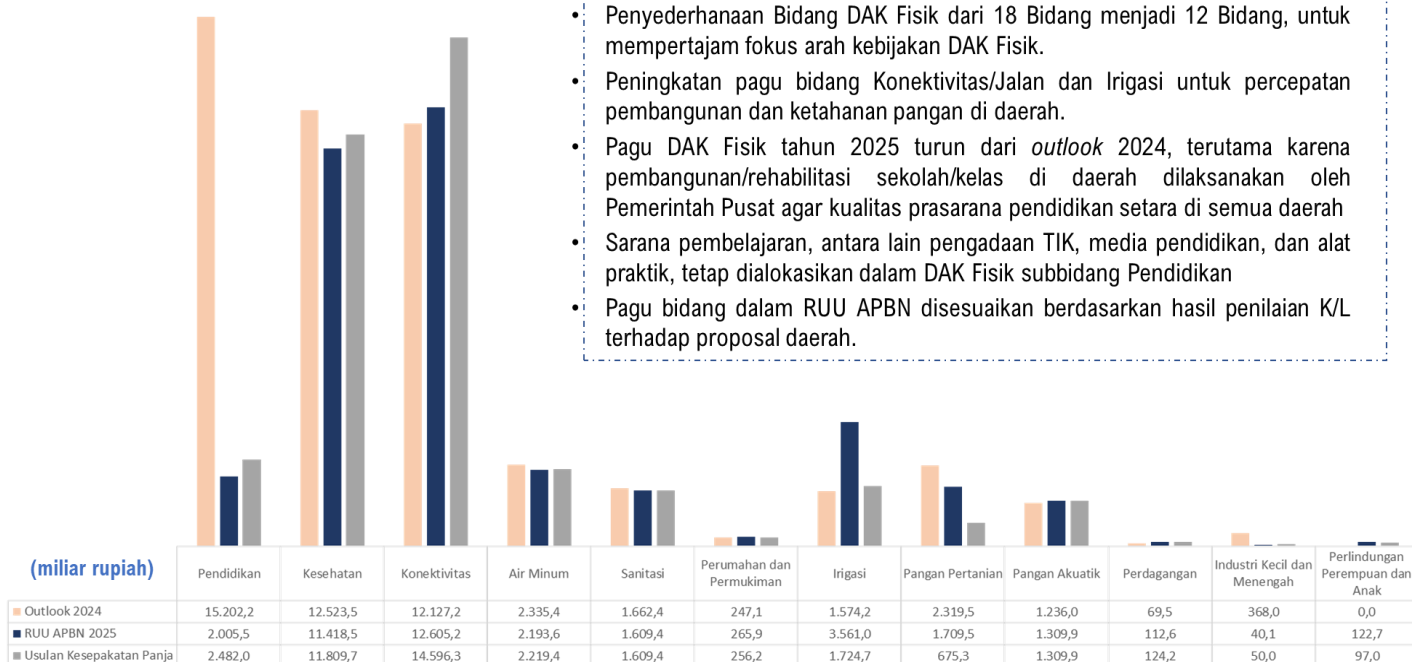


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

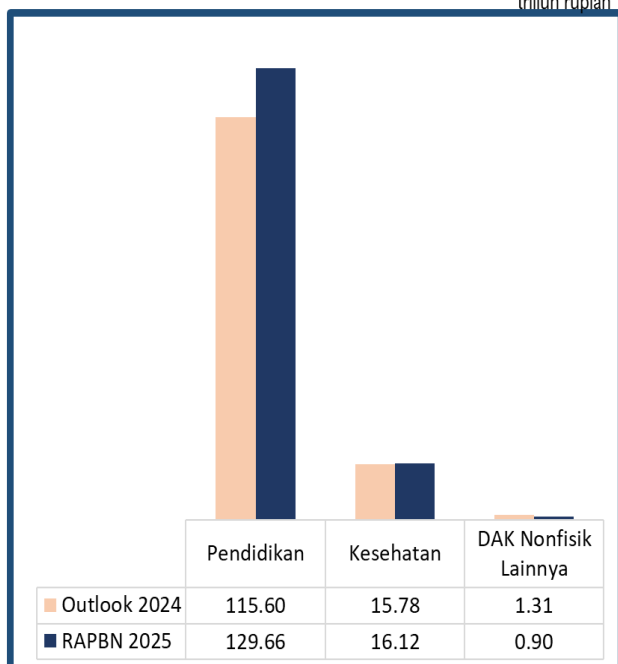
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- ▶ Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- ▶ Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

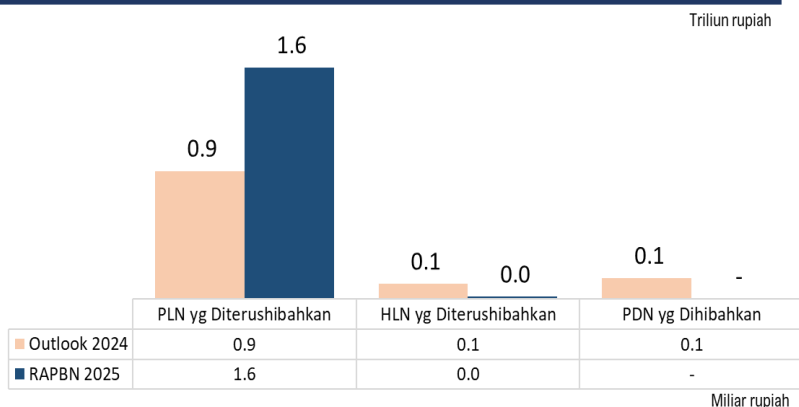
- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

Miliar rupiah

No.	Rincian DAK NonFisik	Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:

PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.

PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

LINGKUNGAN HIDUP

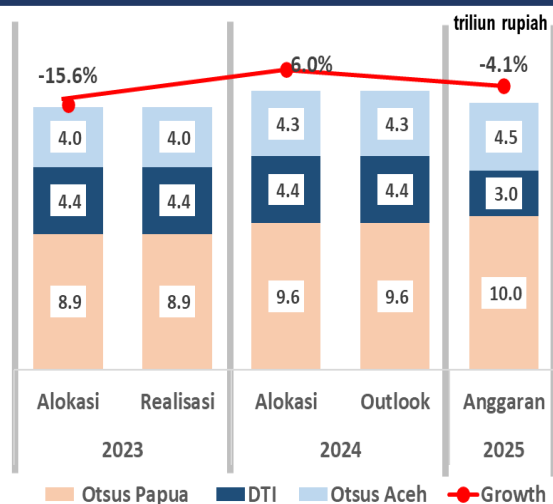
- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

Miliar rupiah

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



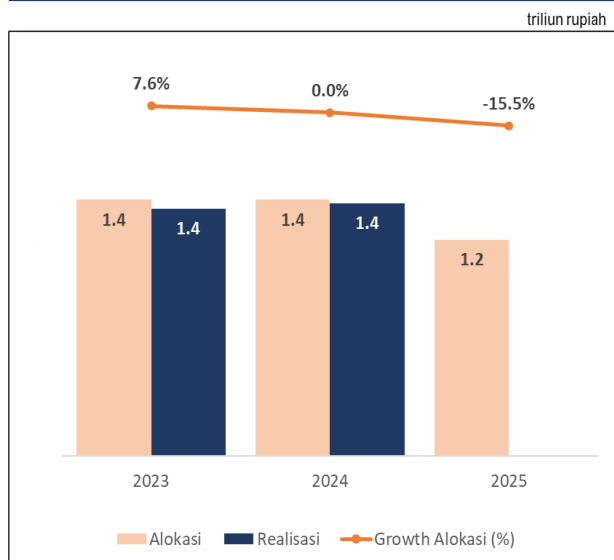
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

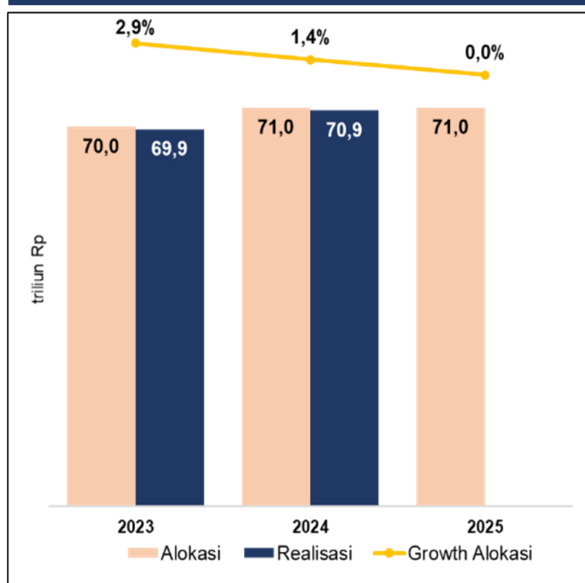
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

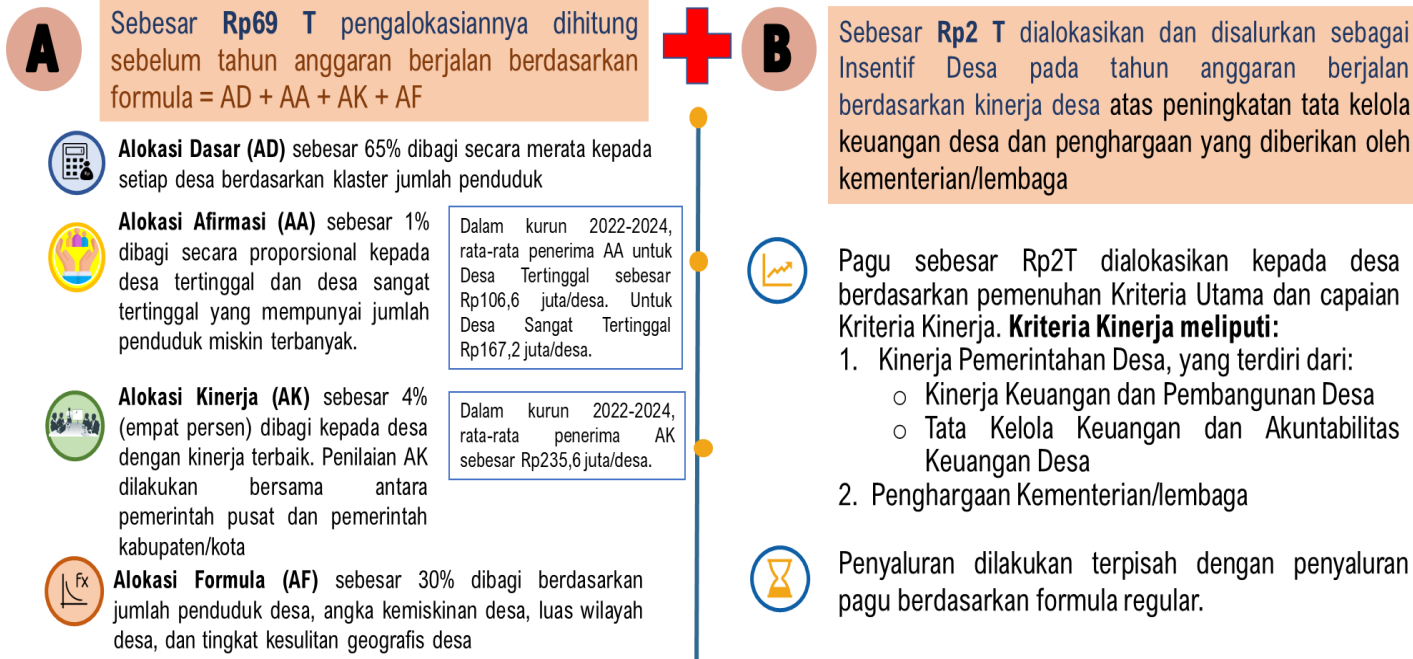
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa** melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa** melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.**

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

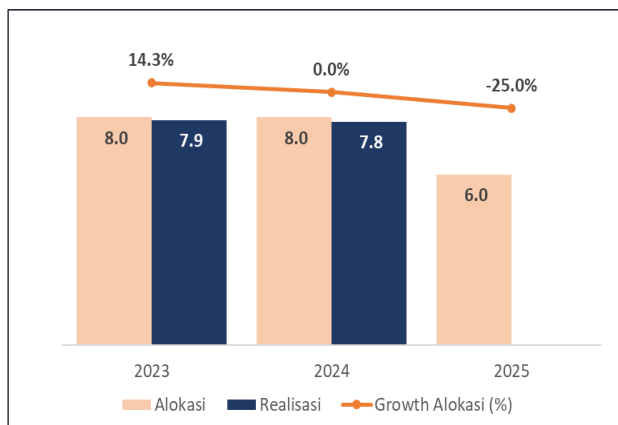
Yang terdiri atas:



PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- ❑ Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- ❑ Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:

A

Sebesar Rp4,0 T pengalokasiannya didasarkan atas kinerja pemda tahun sebelumnya



Dilakukan klusterisasi daerah dalam upaya untuk meningkatkan keadilan dalam penilaian. Klusterisasi menggunakan peta kapasitas fiskal dan kluster daerah tertinggal



Dilakukan filterisasi berupa pemenuhan atas opini BPK atas LKPD dan penetapan APBD tepat waktu, dalam upaya untuk peningkatan tata Kelola keuangan daerah



Alokasi diberikan kepada daerah dengan peringkat terbaik untuk provinsi, kabupaten, dan kota untuk tiap kategori kinerja di setiap kluster.



B

Sebesar Rp2,0 T pengalokasiannya didasarkan atas kinerja pemerintah daerah tahun berjalan



Kinerja pemda yang digunakan diarahkan untuk dapat mendukung fokus kebijakan nasional di tahun berjalan, antara lain: penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau percepatan belanja daerah.



Pengalokasian insentif fiskal dilakukan dalam beberapa periode atas kinerja dalam rentang waktu tertentu di tahun berjalan, dalam upaya untuk percepatan perbaikan kinerja daerah.



RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	61.652.427	2.132.047.308	133.541.747	962.694.182	-	6.700.771	3.296.636.435
2	KAB. ALOR	5.745.565	688.871.926	77.112.000	178.385.413	131.561.026	21.842.026	1.103.517.956
3	KAB. BELU	4.683.886	552.053.263	85.064.554	136.108.377	61.870.789	15.381.360	855.162.229
4	KAB. ENDE	9.568.589	708.123.085	58.796.366	175.020.721	201.178.861	-	1.152.687.622
5	KAB. FLORES TIMUR	5.459.764	721.561.729	70.619.693	176.593.459	176.511.494	-	1.150.746.139
6	KAB. KUPANG	6.993.003	808.713.427	89.023.447	226.770.559	147.903.278	13.632.475	1.293.036.189
7	KAB. LEMBATA	4.831.854	513.443.057	59.816.390	105.749.208	112.346.928	24.105.142	820.292.579
8	KAB. MANGGARAI	7.294.480	729.674.880	57.026.647	233.360.553	123.365.629	-	1.150.722.189
9	KAB. NGADA	4.649.768	528.994.201	64.292.132	134.966.670	145.996.713	6.791.429	885.690.913
10	KAB. SIKKA	8.015.698	736.023.482	54.671.886	214.409.249	147.124.963	7.741.364	1.167.986.642
11	KAB. SUMBA BARAT	4.410.660	436.769.013	101.444.977	86.108.541	56.584.567	14.379.401	699.697.159
12	KAB. SUMBA TIMUR	9.589.828	711.124.526	95.239.521	181.889.263	128.096.914	32.828.969	1.158.769.021
13	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	5.052.007	952.760.106	156.675.436	297.580.799	242.970.904	7.207.988	1.662.247.240
14	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	4.645.506	687.393.884	58.500.638	192.177.466	156.381.635	-	1.099.099.129
15	KOTA KUPANG	27.486.860	801.393.348	47.238.529	184.029.892	-	8.858.401	1.069.007.030
16	KAB. ROTE NDAO	4.803.210	484.194.410	48.591.493	133.260.823	99.236.385	14.163.141	784.249.462
17	KAB. MANGGARAI BARAT	8.135.735	634.054.709	97.329.953	177.755.287	143.972.946	15.112.648	1.076.361.278
18	KAB. NAGEKEO	4.202.571	492.549.546	68.473.183	111.035.316	78.306.129	-	754.566.745
19	KAB. SUMBA BARAT DAYA	4.101.013	633.408.690	89.481.739	200.422.453	171.973.742	7.651.512	1.107.039.149
20	KAB. SUMBA TENGAH	3.412.682	380.079.279	110.825.046	82.695.499	60.476.241	14.068.155	651.556.902
21	KAB. MANGGARAI TIMUR	4.300.557	625.387.717	134.245.466	231.707.110	143.949.316	13.820.780	1.153.410.946
22	KAB. SABU RAJUUA	4.085.906	386.927.782	58.643.022	86.986.761	57.326.555	15.028.755	608.998.781
23	KAB. MALAKA	3.718.873	496.856.175	82.608.686	129.470.932	112.132.232	-	824.786.898
JUMLAH		206.840.442	15.842.405.543	1.899.262.551	4.639.178.533	2.699.267.247	239.314.317	25.526.268.633



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.296.636.435
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	61.652.427
1. DBH Pajak	60.079.101
a. Pajak Penghasilan	48.258.335
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.059.812
c. Cukai Hasil Tembakau	7.760.954
2. DBH Sumber Daya Alam	1.573.326
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	397.747
c. Kehutanan	128.754
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	1.046.825
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.132.047.308
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.542.866.521
2. DAU ditentukan penggunaannya	589.180.787
a. Penggajian Formasi PPPK	184.327.030
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	260.918.641
d. Bidang Kesehatan	41.141.397
e. Bidang Pekerjaan Umum	102.793.719
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.096.235.929
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.541.747
a. Pendidikan	33.737.084
b. Kesehatan	17.995.786
c. Konektivitas	31.805.112
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	9.208.611
h. Pangan Pertanian	9.920.154
i. Pangan Akuatik	30.875.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	962.694.182
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	506.369.289
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	444.009.310
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	3.881.156
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.883.685
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	6.700.771

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. ALOR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.103.517.956
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	5.745.565
1. DBH Pajak	2.954.466
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	2.195.596
<i>b. Pajak Bumi dan Bangunan</i>	758.870
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.791.099
<i>a. Migas</i>	-
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	53
<i>c. Kehutanan</i>	4.213
<i>d. Perikanan</i>	2.750.208
<i>e. Panas Bumi</i>	36.625
3. DBH Lainnya	-
<i>a. Perkebunan Sawit</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	688.871.926
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	498.559.640
2. DAU ditentukan penggunaannya	190.312.286
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	48.934.570
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	3.400.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	73.118.023
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	35.616.476
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	29.243.217
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	255.497.413
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.112.000
<i>a. Pendidikan</i>	2.307.858
<i>b. Kesehatan</i>	28.225.005
<i>c. Konektivitas</i>	32.284.557
<i>d. Air Minum</i>	6.886.544
<i>e. Sanitasi</i>	4.909.769
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	2.498.267
<i>h. Pangan Pertanian</i>	-
<i>i. Pangan Akuatik</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Perdagangan</i>	-
<i>l. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	178.385.413
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	52.158.510
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	86.760.143
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	442.826
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	33.801.657
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	5.222.277
<i>f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah</i>	-
<i>g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	-
<i>j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
D. Dana Desa	131.561.026
E. Insentif Fiskal	21.842.026



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BELU

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	855.162.229
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.683.886
1. DBH Pajak	3.699.601
a. Pajak Penghasilan	3.087.708
b. Pajak Bumi dan Bangunan	611.893
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	984.285
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	20.226
c. Kehutanan	4.213
d. Perikanan	923.221
e. Panas Bumi	36.625
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	552.053.263
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	445.372.314
2. DAU ditentukan penggunaannya	106.680.949
a. Penggajian Formasi PPPK	26.321.149
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	60.978.856
d. Bidang Kesehatan	10.307.090
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.673.854
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	221.172.931
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.064.554
a. Pendidikan	273.120
b. Kesehatan	8.363.944
c. Konektivitas	52.309.993
d. Air Minum	11.458.035
e. Sanitasi	4.972.992
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.600.000
h. Pangan Pertanian	4.086.470
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	136.108.377
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	39.737.284
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	63.255.273
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.791.735
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.590.625
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.332.800
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	61.870.789
E. Insentif Fiskal	15.381.360



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. ENDE

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.152.687.622
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	9.568.589
1. DBH Pajak	6.475.581
a. Pajak Penghasilan	4.018.151
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.457.430
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.093.008
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	382
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	1.610.708
e. Panas Bumi	1.477.617
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	708.123.085
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	563.011.308
2. DAU ditentukan penggunaannya	145.111.777
a. Penggajian Formasi PPPK	27.877.651
b. Pendanaan Kelurahan	4.600.000
c. Bidang Pendidikan	71.332.770
d. Bidang Kesehatan	25.708.175
e. Bidang Pekerjaan Umum	15.593.181
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	233.817.087
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.796.366
a. Pendidikan	2.032.523
b. Kesehatan	10.289.811
c. Konektivitas	30.696.051
d. Air Minum	9.709.563
e. Sanitasi	4.920.929
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.147.489
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	175.020.721
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	48.783.157
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	85.318.123
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.403.472
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.515.969
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	201.178.861
E. Insentif Fiskal	-



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. FLORES TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.150.746.139
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	5.459.764
1. DBH Pajak	3.340.766
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	2.633.492
<i>b. Pajak Bumi dan Bangunan</i>	707.274
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.118.998
<i>a. Migas</i>	-
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	11
<i>c. Kehutanan</i>	4.213
<i>d. Perikanan</i>	2.078.149
<i>e. Panas Bumi</i>	36.625
3. DBH Lainnya	-
<i>a. Perkebunan Sawit</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	721.561.729
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	592.679.555
2. DAU ditentukan penggunaannya	128.882.174
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	44.813.324
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	4.200.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	52.958.374
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	13.452.555
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	13.457.921
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	247.213.152
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.619.693
<i>a. Pendidikan</i>	1.137.797
<i>b. Kesehatan</i>	30.188.712
<i>c. Konektivitas</i>	24.109.431
<i>d. Air Minum</i>	10.335.849
<i>e. Sanitasi</i>	4.847.904
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	-
<i>h. Pangan Pertanian</i>	-
<i>i. Pangan Akuatik</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Perdagangan</i>	-
<i>l. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	176.593.459
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	46.938.029
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	89.573.408
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	32.245.985
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	7.231.940
<i>f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah</i>	604.097
<i>g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	-
<i>j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
D. Dana Desa	176.511.494
E. Insentif Fiskal	-



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KUPANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.293.036.189
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	6.993.003
1. DBH Pajak	4.358.856
a. Pajak Penghasilan	3.108.751
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.250.105
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.634.147
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	93.616
c. Kehutanan	160.427
d. Perikanan	2.342.717
e. Panas Bumi	37.387
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	808.713.427
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	583.787.771
2. DAU ditentukan penggunaannya	224.925.656
a. Penggajian Formasi PPPK	70.042.599
b. Pendanaan Kelurahan	3.400.000
c. Bidang Pendidikan	86.500.846
d. Bidang Kesehatan	44.552.385
e. Bidang Pekerjaan Umum	20.429.826
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	315.794.006
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.023.447
a. Pendidikan	607.893
b. Kesehatan	4.632.500
c. Konektivitas	61.746.282
d. Air Minum	10.016.118
e. Sanitasi	3.373.259
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	8.647.395
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	226.770.559
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	68.693.298
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	111.479.290
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	41.589.611
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.008.360
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	147.903.278
E. Insentif Fiskal	13.632.475



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. LEMBATA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	820.292.579
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.831.854
1. DBH Pajak	2.812.060
a. Pajak Penghasilan	2.119.096
b. Pajak Bumi dan Bangunan	692.964
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.019.794
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	12
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	1.978.094
e. Panas Bumi	37.387
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	513.443.057
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	409.310.456
2. DAU ditentukan penggunaannya	104.132.601
a. Penggajian Formasi PPPK	24.996.961
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	34.786.016
d. Bidang Kesehatan	18.112.702
e. Bidang Pekerjaan Umum	24.836.922
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	165.565.598
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.816.390
a. Pendidikan	1.517.321
b. Kesehatan	22.944.447
c. Konektivitas	25.548.619
d. Air Minum	5.784.278
e. Sanitasi	4.021.725
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	105.749.208
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	24.284.063
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	55.499.676
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	20.760.011
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.455.512
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	749.946
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	112.346.928
E. Insentif Fiskal	24.105.142



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MANGGARAI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.150.722.189
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	7.294.480
1. DBH Pajak	5.009.889
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	3.151.373
<i>b. Pajak Bumi dan Bangunan</i>	1.858.516
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.284.591
<i>a. Migas</i>	-
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	33.782
<i>c. Kehutanan</i>	4.301
<i>d. Perikanan</i>	1.170.961
<i>e. Panas Bumi</i>	1.075.547
3. DBH Lainnya	-
<i>a. Perkebunan Sawit</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	729.674.880
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	571.979.138
2. DAU ditentukan penggunaannya	157.695.742
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	46.834.454
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	5.200.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	60.891.101
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	12.281.151
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	32.489.036
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	290.387.200
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.026.647
<i>a. Pendidikan</i>	1.857.204
<i>b. Kesehatan</i>	2.957.456
<i>c. Konektivitas</i>	31.151.489
<i>d. Air Minum</i>	8.223.152
<i>e. Sanitasi</i>	6.541.714
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	6.295.632
<i>h. Pangan Pertanian</i>	-
<i>i. Pangan Akuatik</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Perdagangan</i>	-
<i>l. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	233.360.553
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	78.385.122
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	115.984.163
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	32.534.878
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	6.456.390
<i>f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah</i>	-
<i>g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
<i>i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	-
<i>j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
D. Dana Desa	123.365.629
E. Insentif Fiskal	-



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. NGADA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	885.690.913
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.649.768
1. DBH Pajak	3.314.936
a. Pajak Penghasilan	2.451.517
b. Pajak Bumi dan Bangunan	863.419
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.334.832
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	12
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	1.191.847
e. Panas Bumi	138.672
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	528.994.201
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	433.818.004
2. DAU ditentukan penggunaannya	95.176.197
a. Penggajian Formasi PPPK	25.670.670
b. Pendanaan Kelurahan	3.200.000
c. Bidang Pendidikan	23.291.253
d. Bidang Kesehatan	8.804.817
e. Bidang Pekerjaan Umum	34.209.457
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	199.258.802
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.292.132
a. Pendidikan	1.586.648
b. Kesehatan	18.235.600
c. Konektivitas	30.061.419
d. Air Minum	10.291.156
e. Sanitasi	4.117.309
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	134.966.670
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.773.855
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	70.602.546
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.513.872
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.675.737
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	145.996.713
E. Insentif Fiskal	6.791.429



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SIKKA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.167.986.642
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	8.015.698
1. DBH Pajak	5.531.620
a. Pajak Penghasilan	4.798.309
b. Pajak Bumi dan Bangunan	733.311
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.484.078
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	145
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	2.195.036
e. Panas Bumi	284.596
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	736.023.482
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	583.441.594
2. DAU ditentukan penggunaannya	152.581.888
a. Penggajian Formasi PPPK	58.310.754
b. Pendanaan Kelurahan	2.600.000
c. Bidang Pendidikan	56.803.579
d. Bidang Kesehatan	13.478.134
e. Bidang Pekerjaan Umum	21.389.421
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	269.081.135
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.671.886
a. Pendidikan	1.127.918
b. Kesehatan	44.141.033
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	3.512.553
e. Sanitasi	3.560.662
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.329.720
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	214.409.249
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.776.247
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	107.703.446
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	40.964.256
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.465.300
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	147.124.963
E. Insentif Fiskal	7.741.364



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUMBA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	699.697.159
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.410.660
1. DBH Pajak	3.261.997
a. Pajak Penghasilan	2.602.901
b. Pajak Bumi dan Bangunan	659.096
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.148.663
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	12
c. Kehutanan	23.613
d. Perikanan	1.087.651
e. Panas Bumi	37.387
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	436.769.013
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	308.184.804
2. DAU ditentukan penggunaannya	128.584.209
a. Penggajian Formasi PPPK	35.241.997
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	48.888.391
d. Bidang Kesehatan	14.484.815
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.769.006
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	187.553.518
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	101.444.977
a. Pendidikan	1.484.739
b. Kesehatan	49.794.762
c. Konektivitas	33.358.618
d. Air Minum	9.969.133
e. Sanitasi	3.204.596
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.633.129
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	86.108.541
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.016.594
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	38.422.661
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.824.386
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.844.900
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	56.584.567
E. Insentif Fiskal	14.379.401



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUMBA TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.158.769.021
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	9.589.828
1. DBH Pajak	7.139.643
a. Pajak Penghasilan	4.105.597
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.034.046
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.450.185
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	11
c. Kehutanan	4.213
d. Perikanan	2.409.336
e. Panas Bumi	36.625
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	711.124.526
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	522.410.940
2. DAU ditentukan penggunaannya	188.713.586
a. Penggajian Formasi PPPK	39.911.504
b. Pendanaan Kelurahan	3.200.000
c. Bidang Pendidikan	75.233.325
d. Bidang Kesehatan	23.901.128
e. Bidang Pekerjaan Umum	46.467.629
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	277.128.784
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.239.521
a. Pendidikan	658.409
b. Kesehatan	17.169.654
c. Konektivitas	51.729.490
d. Air Minum	6.542.503
e. Sanitasi	5.996.246
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.336.019
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	10.807.200
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	181.889.263
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	53.839.306
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	88.650.716
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	577.029
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.321.912
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.500.300
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	128.096.914
E. Insentif Fiskal	32.828.969



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.662.247.240
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	5.052.007
1. DBH Pajak	3.774.612
a. Pajak Penghasilan	2.602.475
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.172.137
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.277.395
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.571
c. Kehutanan	30.798
d. Perikanan	1.205.639
e. Panas Bumi	37.387
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	952.760.106
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	658.663.615
2. DAU ditentukan penggunaannya	294.096.491
a. Penggajian Formasi PPPK	89.464.029
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	115.428.075
d. Bidang Kesehatan	49.637.262
e. Bidang Pekerjaan Umum	37.167.125
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	454.256.235
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	156.675.436
a. Pendidikan	2.489.452
b. Kesehatan	48.136.591
c. Konektivitas	57.467.888
d. Air Minum	11.264.051
e. Sanitasi	15.843.776
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	11.891.845
h. Pangan Pertanian	9.581.833
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	297.580.799
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	94.072.566
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	136.487.605
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	51.116.525
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.402.413
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.996.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	242.970.904
E. Insentif Fiskal	7.207.988



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TIMOR TENGAH UTARA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.099.099.129
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.645.506
1. DBH Pajak	3.121.531
a. Pajak Penghasilan	2.376.287
b. Pajak Bumi dan Bangunan	745.244
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.523.975
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	434.875
c. Kehutanan	30.798
d. Perikanan	1.020.915
e. Panas Bumi	37.387
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	687.393.884
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	538.740.635
2. DAU ditentukan penggunaannya	148.653.249
a. Penggajian Formasi PPPK	25.554.514
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	79.533.390
d. Bidang Kesehatan	24.731.380
e. Bidang Pekerjaan Umum	16.633.965
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	250.678.104
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.500.638
a. Pendidikan	872.661
b. Kesehatan	8.563.800
c. Konektivitas	25.615.042
d. Air Minum	10.364.588
e. Sanitasi	5.789.608
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.294.939
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	192.177.466
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	53.369.966
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	92.131.832
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	39.608.222
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.166.786
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	156.381.635
E. Insentif Fiskal	-



**DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA KUPANG**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.069.007.030
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	27.486.860
1. DBH Pajak	26.541.186
a. Pajak Penghasilan	25.900.361
b. Pajak Bumi dan Bangunan	640.825
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	945.674
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	58
c. Kehutanan	31.944
d. Perikanan	877.047
e. Panas Bumi	36.625
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	801.393.348
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	657.460.173
2. DAU ditentukan penggunaannya	143.933.175
a. Penggajian Formasi PPPK	68.091.163
b. Pendanaan Kelurahan	10.200.000
c. Bidang Pendidikan	36.173.289
d. Bidang Kesehatan	15.334.494
e. Bidang Pekerjaan Umum	14.134.229
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	231.268.421
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.238.529
a. Pendidikan	2.970.928
b. Kesehatan	5.761.449
c. Konektivitas	33.603.301
d. Air Minum	2.564.974
e. Sanitasi	1.339.309
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	998.568
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	184.029.892
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	66.614.910
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	91.237.403
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	20.258.089
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.913.800
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	8.858.401



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. ROTE NDAO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	784.249.462
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.803.210
1. DBH Pajak	2.674.542
a. Pajak Penghasilan	2.015.126
b. Pajak Bumi dan Bangunan	659.416
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.128.668
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	11
c. Kehutanan	4.213
d. Perikanan	2.087.819
e. Panas Bumi	36.625
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	484.194.410
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	374.553.918
2. DAU ditentukan penggunaannya	109.640.492
a. Penggajian Formasi PPPK	23.905.086
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	39.497.939
d. Bidang Kesehatan	24.982.240
e. Bidang Pekerjaan Umum	19.855.227
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	181.852.316
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.591.493
a. Pendidikan	461.608
b. Kesehatan	6.236.297
c. Konektivitas	31.294.202
d. Air Minum	1.508.000
e. Sanitasi	4.594.506
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.496.880
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	133.260.823
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	33.825.843
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	77.887.384
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.436.455
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.111.141
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	99.236.385
E. Insentif Fiskal	14.163.141



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MANGGARAI BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.076.361.278
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	8.135.735
1. DBH Pajak	5.271.355
a. Pajak Penghasilan	4.565.060
b. Pajak Bumi dan Bangunan	706.295
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.864.380
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	4.743
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	2.675.242
e. Panas Bumi	180.094
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	634.054.709
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	488.014.347
2. DAU ditentukan penggunaannya	146.040.362
a. Penggajian Formasi PPPK	41.653.857
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	62.447.333
d. Bidang Kesehatan	10.967.178
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.971.994
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	275.085.240
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.329.953
a. Pendidikan	1.303.373
b. Kesehatan	39.514.920
c. Konektivitas	28.099.333
d. Air Minum	11.112.292
e. Sanitasi	4.816.197
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	12.483.838
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	177.755.287
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	55.384.344
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	88.750.022
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.662.376
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.958.545
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	143.972.946
E. Insentif Fiskal	15.112.648



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. NAGEKEO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	754.566.745
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.202.571
1. DBH Pajak	2.690.522
a. Pajak Penghasilan	1.993.816
b. Pajak Bumi dan Bangunan	696.706
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.512.049
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2.975
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	1.217.532
e. Panas Bumi	287.241
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	492.549.546
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	413.862.761
2. DAU ditentukan penggunaannya	78.686.785
a. Penggajian Formasi PPPK	23.324.302
b. Pendanaan Kelurahan	3.200.000
c. Bidang Pendidikan	24.052.046
d. Bidang Kesehatan	8.811.829
e. Bidang Pekerjaan Umum	19.298.608
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	179.508.499
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.473.183
a. Pendidikan	1.234.005
b. Kesehatan	1.011.928
c. Konektivitas	45.544.455
d. Air Minum	3.617.019
e. Sanitasi	4.518.965
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.596.811
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	7.950.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	111.035.316
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.702.629
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	64.263.638
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	13.569.049
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.500.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	78.306.129
E. Insentif Fiskal	-



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUMBA BARAT DAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.107.039.149
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.101.013
1. DBH Pajak	2.813.735
a. Pajak Penghasilan	2.075.087
b. Pajak Bumi dan Bangunan	738.648
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.287.278
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	11
c. Kehutanan	9.058
d. Perikanan	1.241.584
e. Panas Bumi	36.625
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	633.408.690
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	447.064.235
2. DAU ditentukan penggunaannya	186.344.455
a. Penggajian Formasi PPPK	36.891.425
b. Pendanaan Kelurahan	400.000
c. Bidang Pendidikan	89.804.542
d. Bidang Kesehatan	30.355.008
e. Bidang Pekerjaan Umum	28.893.480
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	289.904.192
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.481.739
a. Pendidikan	910.527
b. Kesehatan	16.098.829
c. Konektivitas	34.332.776
d. Air Minum	16.632.597
e. Sanitasi	7.709.250
f. Perumahan dan Permukiman	8.201.643
g. Irigasi	5.596.117
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	200.422.453
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	85.305.280
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	79.218.278
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.484.894
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.414.001
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	171.973.742
E. Insentif Fiskal	7.651.512



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUMBA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	651.556.902
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	3.412.682
1. DBH Pajak	2.255.070
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	1.477.249
<i>b. Pajak Bumi dan Bangunan</i>	777.821
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.157.612
<i>a. Migas</i>	-
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	11
<i>c. Kehutanan</i>	9.058
<i>d. Perikanan</i>	1.111.918
<i>e. Panas Bumi</i>	36.625
3. DBH Lainnya	-
<i>a. Perkebunan Sawit</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	380.079.279
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	283.383.043
2. DAU ditentukan penggunaannya	96.696.236
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	29.922.012
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	-
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	18.297.263
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	5.652.852
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	42.824.109
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	193.520.545
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	110.825.046
<i>a. Pendidikan</i>	888.362
<i>b. Kesehatan</i>	30.220.288
<i>c. Konektivitas</i>	57.427.079
<i>d. Air Minum</i>	12.926.382
<i>e. Sanitasi</i>	4.999.654
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	2.800.000
<i>h. Pangan Pertanian</i>	1.563.281
<i>i. Pangan Akuatik</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Perdagangan</i>	-
<i>l. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	82.695.499
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	18.150.588
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	40.203.084
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	16.972.452
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	1.500.000
<i>f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah</i>	-
<i>g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	400.660
<i>i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	5.468.715
<i>j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
D. Dana Desa	60.476.241
E. Insentif Fiskal	14.068.155



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MANGGARAI TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.153.410.946
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.300.557
1. DBH Pajak	2.876.474
a. Pajak Penghasilan	2.119.352
b. Pajak Bumi dan Bangunan	757.122
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.424.083
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	12
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	1.237.031
e. Panas Bumi	182.739
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	625.387.717
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	487.438.655
2. DAU ditentukan penggunaannya	137.949.062
a. Penggajian Formasi PPPK	22.069.807
b. Pendanaan Kelurahan	3.400.000
c. Bidang Pendidikan	50.577.321
d. Bidang Kesehatan	33.198.412
e. Bidang Pekerjaan Umum	28.703.522
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	365.952.576
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	134.245.466
a. Pendidikan	735.261
b. Kesehatan	93.114.929
c. Konektivitas	27.664.114
d. Air Minum	6.049.037
e. Sanitasi	6.682.125
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	231.707.110
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	61.082.888
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	117.938.991
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	47.249.131
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.936.100
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	143.949.316
E. Insentif Fiskal	13.820.780

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SABU RAIJUA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	608.998.781
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	4.085.906
1. DBH Pajak	2.426.836
<i>a. Pajak Penghasilan</i>	1.759.554
<i>b. Pajak Bumi dan Bangunan</i>	667.282
<i>c. Cukai Hasil Tembakau</i>	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.659.070
<i>a. Migas</i>	-
<i>b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	43.650
<i>c. Kehutanan</i>	4.213
<i>d. Perikanan</i>	1.574.582
<i>e. Panas Bumi</i>	36.625
3. DBH Lainnya	-
<i>a. Perkebunan Sawit</i>	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	386.927.782
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	291.632.558
2. DAU ditentukan penggunaannya	95.295.224
<i>a. Penggajian Formasi PPPK</i>	2.973.616
<i>b. Pendanaan Kelurahan</i>	1.000.000
<i>c. Bidang Pendidikan</i>	45.025.517
<i>d. Bidang Kesehatan</i>	26.242.376
<i>e. Bidang Pekerjaan Umum</i>	20.053.715
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	145.629.783
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.643.022
<i>a. Pendidikan</i>	660.770
<i>b. Kesehatan</i>	18.870.213
<i>c. Konektivitas</i>	23.887.858
<i>d. Air Minum</i>	10.675.346
<i>e. Sanitasi</i>	4.548.835
<i>f. Perumahan dan Permukiman</i>	-
<i>g. Irigasi</i>	-
<i>h. Pangan Pertanian</i>	-
<i>i. Pangan Akuatik</i>	-
<i>j. Industri Kecil dan Menengah</i>	-
<i>k. Perdagangan</i>	-
<i>l. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	86.986.761
<i>a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan</i>	25.403.829
<i>b. Tunjangan Guru ASN Daerah</i>	42.659.348
<i>c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya</i>	-
<i>d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i>	16.306.294
<i>e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)</i>	2.111.600
<i>f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah</i>	-
<i>g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</i>	-
<i>h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	505.690
<i>i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	-
<i>j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM</i>	-
D. Dana Desa	57.326.555
E. Insentif Fiskal	15.028.755



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MALAKA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	824.786.898
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	3.718.873
1. DBH Pajak	2.592.103
a. Pajak Penghasilan	1.940.156
b. Pajak Bumi dan Bangunan	651.947
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.126.770
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	23.857
c. Kehutanan	4.301
d. Perikanan	1.061.225
e. Panas Bumi	37.387
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	496.856.175
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	376.805.334
2. DAU ditentukan penggunaannya	120.050.841
a. Penggajian Formasi PPPK	24.253.557
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	57.969.855
d. Bidang Kesehatan	26.980.754
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.846.675
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	212.079.618
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.608.686
a. Pendidikan	259.464
b. Kesehatan	38.751.889
c. Konektivitas	29.306.066
d. Air Minum	9.919.624
e. Sanitasi	4.371.643
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	129.470.932
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	40.200.205
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	53.415.177
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	31.515.411
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.340.139
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	112.132.232
E. Insentif Fiskal	-

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ludiro2. Sandy Firdaus3. Purwanto4. Jaka Sucipta5. Lydia Kurniawati Christyana6. Adriyanto7. Agung Widiadi	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</p> <p>Direktur Dana Transfer Umum</p> <p>Direktur Dana Transfer Khusus</p> <p>Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan</p> <p>Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah</p> <p>Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer</p>
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyses Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik8. Tim Reguler Hibah Daerah9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710





2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta - 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

